

**PENGARUH TENAGA KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN, INVESTASI
DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



**SISKA PRAMITA SARI
2011/1103395**

**PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH TENAGA KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN, INVESTASI DAN
PNEGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI
INDONESIA**

Nama : Siska Pramita Sari
TM/NIM : 2011/1103395
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2016

Disetujui Oleh

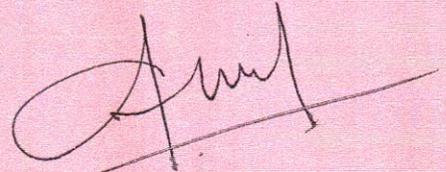
Pembimbing I



Prof. Dr. Syamsul Amar B, M.S

NIP : 19571021 1986031 1 001

Pembimbing II

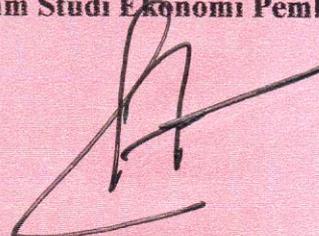


Ariusni, S.E, M.Si

NIP: 19770309 200801 2 011

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Ali Anis, M.S

NIP : 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Padang*

**PENGARUH TENAGA KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN, INVESTASI DAN
PNEGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI
INDONESIA**

Nama : Siska Pramita Sari

TM/NIM : 2011/1103395

Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

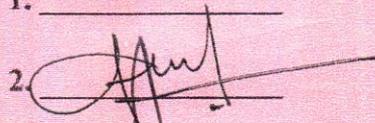
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2016

Tim Penguji

| No. | Jabatan | Nama |
|------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | Ketua | : Prof. Dr. Syamsul Amar B., M.S |
| 2. | Sekretaris | : Ariusni, S.E, M.Si |
| 3. | Anggota | : Dr. Idris, M.Si |
| 4. | Anggota | : Drs. Ali Anis, M.S |

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Pramita Sari
NIM/Tahun Masuk : 1103395/2011
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 14 Juni 1993
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Gapura No. 9, Kelurahan Air Tawar Timur,
Kecamatan Padang Timur
No. Hp/Telepon : 087791803799
Judul Skripsi : Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi
dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi
Pendapatan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun program perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Mei 2016
Yang menyatakan



Siska Pramita Sari
BP/NIM. 2011/1103395

ABSTRAK

Siska Pramita Sari, 1103395/2011: Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar B, M.S dan Ibuk Ariusni, S.E, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) pengaruh tenaga kerja terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, 2) pengaruh tingkat pendidikan terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, 3) pengaruh investasi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia dan, 4) pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder dan panel yaitu gabungan data time series dan cross section dengan periode 2010-2013. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Induktif yang terdiri atas Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi, Analisis data panel dengan hasil pengolahan jatuh pada metode *Fixed Effect Model* (FEM). Untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan 1) Uji t dan 2) Uji F.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan ($\text{prob} = 0,0007 < \alpha = 0,05$) terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, (2) tingkat pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan ($\text{prob} = 0,9567 > \alpha = 0,05$) terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, (3) investasi berpengaruh positif dan signifikan ($\text{prob} = 0,0200 < \alpha = 0,05$) terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, (4) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan ($\text{prob} = 0,2793 > \alpha = 0,05$) terhadap distribusi pendapatan di Indonesia dan, (5) secara bersama-sama tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan ($F_{\text{hitung}} = 13,2382 > F_{\text{tabel}} = 2,44$) terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, maka disarankan bagi masyarakat lebih menyadari bahwa pendidikan sangat dibutuhkan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga distribusi pendapatan akan semakin merata, serta diharapkan pemerintah dapat meningkatkan *quality of service* agar masyarakat setia menggunakan pelayanan kesehatan di Indonesia dan tidak menggunakan pendapatannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di negara lain.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan khususnya kajian ekonomi publik serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terealisasinya skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar B, M.S selaku pembimbing I dan Ibu Ariusni, S.E, M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku ketua dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu staf pengajar serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan proses administrasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Bapak ibu staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
5. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses pengambilan data skripsi.
6. Kedua orang tua, Ayah Armen Hariyanto, Ibu Sumiati dan Ketiga orang saudara-saudari saya yang terus memberikan doa dan dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Sahabat-sahabat Maryam, Rizka, Alita, Rosi, Siti Maryam yang saling mensupport dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan se-angkatan 2011 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 15 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS | |
| A. Kajian Teori | 16 |
| 1. Konsep Distribusi Pendapatan | 18 |
| 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan | 25 |
| B. Penelitian Terdahulu | 38 |
| C. Kerangka konseptual dan Hipotesis | 39 |
| 1. Kerangka Konseptual | 39 |
| 2. Hipotesis Penelitian | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 43 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 43 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| E. Definisi Operasional Variabel | 44 |
| F. Teknik Analisis Data | 46 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian | 56 |
| 1. Gambaran Umum Daerah Penelitian..... | 56 |
| a. Keadaan Pendidikan Indonesia | 56 |
| b. Keadaan Kesehatan di Indonesia | 57 |
| c. Keadaan Jalan Infrastruktur di Indonesia | 58 |
| 2. Deskripsi Variabel Penelitian | 60 |
| a. Deskripsi Distribusi Pendapatan di Indonesia | 60 |
| b. Deskripsi Tenaga Kerja di Indonesia | 63 |
| c. Deskripsi Tingkat Pendidikan di Indonesia | 66 |
| d. Deskripsi Investasi di Indonesia | 69 |
| e. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia..... | 72 |
| 3. Analisis Induktif | 75 |
| a. Analisis Model Regresi Panel | 75 |
| b. Analisis Asumsi Klasik..... | 78 |
| c. Koefisien Determinasi (R ²) | 81 |
| d. Pengujian Hipotesis | 82 |
| B. Pembahasan | 84 |
| 1. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia | 84 |
| 2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia | 86 |
| 3. Pengaruh Investasi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia | 88 |
| 4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia..... | 91 |
| 5. Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia | 95 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 96 |
| B. Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita dan Indeks Gini di Indonesia Tahun 2011-2013 | 3 |
| 2. Angkatan Kerja yang Bekerja di Provinsi-Provinsi Indonesia 2011-2013 | 5 |
| 3. Rata - rata Lama Sekolah di Provinsi-Provinsi Indonesia 2011-2013 | 7 |
| 4. Persentase PMA di Provinsi-Provinsi Indonesia tahun 2011-2013 | 9 |
| 5. Persentase Pengeluaran Pemerintah di Provinsi-Provinsi Indonesia tahun 2011-2013 | 11 |
| 6. Indeks Gini, Angkatan Kerja, Rata-rata Lama Sekolah, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia tahun 2010-2013 | 12 |
| 7. Klasifikasi Nilai d | 53 |
| 8. Indikator Tingkat Pendidikan di Indonesia tahun 2012-2014 | 56 |
| 9. Jumlah Rumah Sakit Umum, Khusus dan Puskesmas di Indonesia tahun 2012-2013 | 57 |
| 10. Angka Indeks Gini di Indonesia per Provinsi tahun 2010-2013 | 61 |
| 11. Tenaga Kerja yang Bekerja 15 tahun keatas di Indonesia per Provinsi Tahun 2010 – 2013 | 64 |
| 12. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun Keatas di Indonesia per 33 Provinsi Tahun 2010-2013 | 67 |
| 13. Penanaman Modal Asing di Indonesia per 33 Provinsi Tahun 2010-2013 | 70 |
| 14. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur di Indonesia per 33 Provinsi Tahun 2010-2013 | 73 |
| 15. <i>Chow Test</i> | 79 |
| 16. <i>Hausman Test</i> | 76 |
| 17. Hasil Uji Regresi Panel | 77 |
| 18. Hasil Uji Multikolinearitas Menggunakan Nilai VIF | 79 |
| 19. Hasil Uji Heterokedastisitas | 80 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|----------------|
| 2.1 Memperkirakan Koefisien Gini | 21 |
| 2.2 Kurva Tradeoff Finansial dalam Pengembalian Keputusan untuk Melanjutkan Sekolah | 29 |
| 2.3 Kurva Hubungan Investasi dengan Pendapatan Nasional | 32 |
| 2.4 Kurva Efek <i>Crowding-Out</i> | 36 |
| 2.5 Kerangka Konseptual Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia | 40 |
| 4.1 Aturan Membandingkan Uji Durbin-Watson dengan Tabel Durbin Watson | 81 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Tenaga Kerja (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), Investasi (X_3), Pengeluaran Pemerintah (X_4) terhadap Distribusi Pendapatan (Y) di Indonesia Tahun 2010-2013..... | 102 |
| Lampiran 2. Hasil Uji Chow Test | 105 |
| Lampiran 3. Hasil Uji Hausman Test | 106 |
| Lampiran 4. Hasil Estimasi Regresi Panel | 107 |
| Lampiran 3. Hasil Uji Multikolinearitas Menggunakan Nilai VIF | 108 |
| Lampiran 4. Hasil Uji Heterokedastisitas | 109 |
| Lampiran 5. Tabel t | 110 |
| Lampiran 6. Tabel F | 112 |
| Lampiran 7. Tabel Durbin-Watson | 114 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pembangunan merupakan tiga masalah yang sering kali terjadi pada suatu negara. Jika ketiga permasalahan tersebut selama periode tertentu sedikit banyak telah teratasi, maka tidak diragukan lagi bahwa periode tersebut memang merupakan periode pembangunan bagi negara yang bersangkutan. Akan tetapi, jika satu, dua atau bahkan semua dari tiga persoalan mendasar tersebut menjadi semakin buruk, maka negara itu tidak bisa dikatakan telah mengalami proses pembangunan yang positif meskipun, barangkali selama kurun waktu tersebut, pendapatan perkapitanya mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat (Todaro.2006:21).

Tujuan utama yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga adalah memerangi kemiskinan, mengatasi ketidakmerataan distribusi pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran, memenuhi standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk, memperluas kesempatan di bidang ekonomi dan sosial serta membina keutuhan dan kesatuan mereka sebagai bangsa (*nation-state*). Terkait dengan tujuan tersebut, negara-negara berkembang juga mengalami permasalahan yaitu kemiskinan absolut yang kronis dan meluas, tingkat pengangguran serta setengah pengangguran yang tinggi dan cenderung terus meningkat, juran kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin lama

semakin melebar, ancaman stagnasi dan rendahnya tingkat produktivitas di sektor pertanian, meningkatnya ketidakseimbangan taraf hidup dan kesempatan ekonomi antara daerah pedesaan dan kawasan perkotaan, kerusakan lingkungan hidup, kurang memadainya pelayanan dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, semakin memburuknya kondisi neraca pembayaran dan terus membengkaknya utang luar negeri, terus meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dari luar negeri serta semakin lemahnya struktur kelembagaan dan sistem tata nilai yang juga semakin terpengaruh oleh budaya luar (Todaro.2004:60).

Terus melebarnya kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin bukanlah merupakan suatu manifestasi atas melebarnya disparitas ekonomi antara kelompok negara kaya dan miskin. Hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa tingkat pendapatan dari semua negara di dunia tidak sama. Sampai batas tertentu senantiasa terdapat ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Antara orang kaya dan miskin di semua negara baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, pasti terdapat perbedaan atau ketimpangan pendapatan yang besar. Hanya saja, ketimpangan di negara-negara berkembang ternyata jauh lebih parah jika dibandingkan dengan negara-negara maju.

Menurut James D. Wolfensohn yang merupakan presiden Bank Dunia menyatakan bahwa tujuan utama dalam pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di antara negara-negara di dunia dan di

dalam negara itu sendiri. Tantangan utama pembangunan pada zaman kita saat ini adalah tantangan terhadap timbulnya penyatuan (*inclusion*).

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah gariskemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh, adalah jika laju pertumbuhan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya (Tambunan, 2001).

Tabel 1.
Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita dan Indeks Gini di Indonesia Tahun 2011-2013

| Daerah | Tahun | 40% Berpengeluaran Rendah | 40% Berpengeluaran Sedang | 20% Berpengeluaran Tinggi | Indeks Gini |
|---------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Kota (Urban) | 2011 | 16,10 | 34,79 | 49,11 | 0,42 |
| | 2012 | 16,00 | 34,53 | 49,48 | 0,42 |
| | 2013 | 15,40 | 34,83 | 49,77 | 0,43 |
| Desa (Rural) | 2011 | 19,96 | 37,46 | 42,58 | 0,34 |
| | 2012 | 20,60 | 37,57 | 41,82 | 0,33 |
| | 2013 | 21,03 | 37,96 | 41,00 | 0,32 |
| Kota + Desa (Urban+Rural) | 2011 | 16,85 | 34,73 | 48,42 | 0,41 |
| | 2012 | 16,98 | 34,41 | 48,61 | 0,41 |
| | 2013 | 16,87 | 34,09 | 49,04 | 0,41 |

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa indeks gini pada daerah kota memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan

daerah desa di setiap tahunnya. Indeks gini lebih tinggi pada daerah kota, menggambarkan bahwa pada daerah perkotaan memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi. Tingginya ketimpangan pendapatan di daerah kota, diakibatkan masih banyaknya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Dimana orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin, ditambah dengan minimnya pendidikan yang menjadi sumber utama dalam mencari pekerjaan yang akan membantu untuk menghasilkan pendapatan sehingga diharapkan mampu untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin. Sedangkan pada daerah desa, indeks gini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di desa semakin mengalami pemerataan. Ini diakibatkan karena pada umumnya sebagian besar masyarakat di desa memiliki mata pencaharaan yang sama seperti bertani, berladang dan sebagainya. Sehingga potensi bagi masyarakat di desa untuk menganggur semakin berkurang. Berkurangnya masyarakat yang menganggur, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pekerjaan yang mendatangkan pendapatan bagi mereka, sehingga ketimpangan pendapatan yang terjadi di desa semakin berada dalam kondisi merata.

Distribusi pendapatan merupakan suatu gambaran tentang merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan kepada penduduknya pada suatu negara. Dengan pengertian yang demikian, dapat dilihat nantinya apa saja yang mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu negara.

Tenaga kerja merupakan salah satu variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Karena semakin banyak jumlah tenaga kerja yang bekerja, maka akan semakin meningkatkan pendapatan sehingga semua kebutuhan hidup akan mampu terpenuhi. Dengan semakin

meningkatnya pendapatan, maka akan mengakibatkan distribusi pendapatan yang ada disuatu daerah akan semakin merata.

Tabel 2.
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di Provinsi-Provinsi Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 (dalam jiwa)

| Provinsi | Tahun | | | Laju Pertumbuhan (%) | |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Aceh | 1.852.473 | 1.798.547 | 1.824.586 | -3,00 | 1,43 |
| Sumatera Utara | 5.912.114 | 5.751.682 | 5.899.560 | -2,79 | 2,51 |
| Sumatera Barat | 2.070.725 | 2.037.642 | 2.005.625 | -1,62 | -1,60 |
| Riau | 2.424.180 | 2.399.002 | 2.481.361 | -1,05 | 3,32 |
| Kepulauan Riau | 781.824 | 824.567 | 848.660 | 5,18 | 2,84 |
| Jambi | 1.434.998 | 1.423.624 | 1.382.471 | -0,80 | -2,98 |
| Sumatera Selatan | 3.553.104 | 3.532.932 | 3.464.620 | -0,57 | -1,97 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 589.634 | 583.102 | 596.786 | -1,12 | 2,29 |
| Bengkulu | 873.719 | 830.266 | 801.146 | -5,23 | -3,63 |
| Lampung | 3.482.301 | 3.449.307 | 3.385.046 | -0,96 | -1,90 |
| DKI Jakarta | 4.588.418 | 4.838.596 | 4.712.836 | 5,17 | -2,67 |
| Jawa Barat | 17.454.781 | 18.321.108 | 18.413.984 | 4,73 | 0,50 |
| Banten | 4.529.660 | 4.605.847 | 4.637.019 | 1,65 | 0,67 |
| JawaTengah | 15.916.135 | 16.132.890 | 15.964.048 | 1,34 | -1,06 |
| DI Yogyakarta | 1.798.595 | 1.867.708 | 1.847.070 | 3,70 | -1,12 |
| Jawa Timur | 18.940.340 | 19.081.995 | 19.266.457 | 0,74 | 0,96 |
| Bali | 2.204.874 | 2.268.708 | 2.273.897 | 2,81 | 0,23 |
| Nusa Tenggara Barat | 1.962.240 | 1.978.764 | 1.981.842 | 0,84 | 0,16 |
| Nusa Tenggara Timur | 2.096.259 | 2.095.683 | 2.075.948 | -0,03 | -0,95 |
| Kalimantan Barat | 2.146.572 | 2.106.514 | 2.053.823 | -1,90 | -2,57 |
| Kalimantan Tengah | 1.105.701 | 1.070.210 | 1.063.711 | -3,32 | -0,61 |
| Kalimantan Selatan | 1.824.929 | 1.821.327 | 1.811.096 | -0,20 | -0,56 |
| Kalimantan Timur | 1.591.003 | 1.619.118 | 1.624.272 | 1,74 | 0,32 |
| Sulawesi Utara | 990.720 | 957.292 | 946.852 | -3,49 | -1,10 |
| Gorontalo | 445.210 | 445.729 | 449.140 | 0,12 | 0,76 |
| Sulawesi Tengah | 1.260.999 | 1.165.442 | 1.175.930 | -8,20 | 0,89 |
| Sulawesi Selatan | 3.375.498 | 3.351.908 | 3.291.280 | -0,70 | -1,84 |
| Sulawesi Barat | 536.048 | 548.783 | 523.960 | 2,32 | -4,74 |
| Sulawesi Tenggara | 1.026.548 | 975.879 | 968.949 | -5,19 | -0,72 |
| Maluku | 650.112 | 610.362 | 598.792 | -6,51 | -1,93 |
| Maluku Utara | 437.870 | 443.946 | 445.359 | 1,37 | 0,32 |
| Papua | 1.476.227 | 1.527.933 | 1.634.332 | 3,38 | 6,51 |
| Papua Barat | 336.588 | 341.741 | 353.619 | 1,51 | 3,36 |

Sumber :BPS, Statistik Indonesia, 2014 diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja selalu mengalami fluktuasi pada setiap tahun di masing-masing provinsi di Indonesia. Pada tahun 2012 angkatan kerja yang bekerja di Kepulauan Riau menunjukkan angka sebesar 5,18 persen yang merupakan laju pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja tertinggi dan Sulawesi Tengah menunjukkan angka terendah yaitu sebesar -8,20 persen. Pada tahun 2013 angkatan kerja yang bekerja Papua menunjukkan angka sebesar 6,51 persen yang merupakan laju pertumbuhan angkatan kerja tertinggi dan Sulawesi Barat menunjukkan angka terendah yaitu -4,74 persen. Perkembangan angkatan kerja yang bekerja pada Kepulauan Riau tertinggi karena disebabkan banyaknya investor asing yang membuka usaha atau perusahaan asing yang membutuhkan banyak buruh di provinsi tersebut, sehingga banyak lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyebabkan banyaknya pencari kerja yang menetap disana untuk mendapatkan pendapatan .

Selain tenaga kerja, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu variabel yang diduga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah maupun negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin menurunkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan sebaliknya, jika semakin rendah tingkat pendidikan atau kualitas sumber daya manusia, maka ketidakmerataan distribusi akan semakin timpang. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat pendidikan, maka seseorang akan lebih memiliki banyak ilmu dan pengetahuan untuk mampu menciptakan lapangan kerja maupun untuk mendapatkan pekerjaan yang nantinya akan memberikan

dampak pada upah yang akan mereka terima nantinya. Berikut ini tabel yang menggambarkan keadaan tingkat pendidikan di provinsi-provinsi Indonesia:

Tabel 3.
Rata-rata Lama Sekolah di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2011 hingga 2013 (dalam tahun)

| Provinsi | Tahun | | | Laju Pertumbuhan | |
|---------------------------|-------|------|------|------------------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Aceh | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 1,12 | 1,11 |
| Sumatera Utara | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 3,30 | 0,00 |
| Sumatera Barat | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 2,33 | 0,00 |
| Riau | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 0,00 | 2,27 |
| Kepulauan Riau | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 1,02 | 1,01 |
| Jambi | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 2,44 | 1,20 |
| Sumatera Selatan | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 1,27 | 1,25 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 2,60 | 0,00 |
| Bengkulu | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 2,35 | 1,16 |
| Lampung | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 1,28 | 1,27 |
| DKI Jakarta | 10,4 | 10,6 | 11 | 1,89 | 3,64 |
| Jawa Barat | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 2,47 | 0,00 |
| Banten | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 2,33 | 0,00 |
| Jawa Tengah | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 2,70 | 0,00 |
| DI Yogyakarta | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 1,09 | 1,08 |
| Jawa Timur | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 2,67 | 0,00 |
| Bali | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 3,49 | 0,00 |
| Nusa Tenggara Barat | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 4,17 | 0,00 |
| Nusa Tenggara Timur | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 4,23 | 1,39 |
| Kalimantan Barat | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 4,23 | 1,39 |
| Kalimantan Tengah | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 2,44 | 0,00 |
| Kalimantan Selatan | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 3,80 | 1,25 |
| Kalimantan Timur | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 1,09 | 2,13 |
| Sulawesi Utara | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 1,11 | 1,10 |
| Gorontalo | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 0,00 | 2,67 |
| Sulawesi Tengah | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 1,23 | 1,22 |
| Sulawesi Selatan | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 2,53 | 1,25 |
| Sulawesi Barat | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 4,11 | 1,35 |
| Sulawesi tenggara | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 1,20 | 1,19 |
| Maluku | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 5,43 | 0,00 |
| Maluku Utara | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 3,53 | 2,30 |
| Papua | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 4,92 | 11,59 |
| Papua Barat | 8,8 | 9,2 | 8,5 | 4,35 | -8,24 |

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014

Dari Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 tertinggi berada pada provinsi Maluku dengan angka sebesar 5,43 persen. Sedangkan provinsi Riau dan Gorontalo menunjukkan angka terendah yaitu sebesar 0,00 persen karena tidak adanya perubahan pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2013 Papua menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata lama sekolah dengan angka sebesar 11,59 persen yang merupakan laju pertumbuhan rata-rata lama sekolah tertinggi dan Papua Barat menunjukkan angka terendah yaitu sebesar minus 8,24.

Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. Dengan adanya penambahan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sukirno, 2004). Investasi swasta terpusat hanya di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Dengan semakin banyaknya investasi yang ditanam pada suatu daerah, mengakibatkan pendapatan yang nantinya juga akan berdampak pada keadaan distribusi pendapatan yang terjadi di daerah tersebut. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan keadaan investasi di provinsi-provinsi Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 :

Tabel 4.
Data Persentase Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi-Provinsi
Indonesia terhadap GNP tahun 2011 hingga 2013 (dalam persen)

| Provinsi | Tahun | | | Rata-rata |
|---------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Aceh | 0,12 | 0,70 | 0,33 | 0,38 |
| Sumatera Utara | 3,87 | 2,63 | 3,10 | 3,20 |
| Sumatera Barat | 0,12 | 0,31 | 0,32 | 0,25 |
| Riau | 1,09 | 4,69 | 4,56 | 3,45 |
| Jambi | 0,10 | 0,64 | 0,12 | 0,29 |
| Sumatera Selatan | 2,86 | 3,20 | 1,70 | 2,59 |
| Bengkulu | 0,22 | 0,12 | 0,08 | 0,14 |
| Lampung | 0,41 | 0,47 | 0,16 | 0,35 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0,75 | 0,24 | 0,39 | 0,46 |
| Kepulauan Riau | 1,13 | 2,19 | 1,10 | 1,47 |
| DKI Jakarta | 24,77 | 16,72 | 9,05 | 16,85 |
| Jawa Barat | 19,72 | 17,14 | 24,90 | 20,58 |
| Jawa Tengah | 0,90 | 0,98 | 1,62 | 1,17 |
| DI Yogyakarta | 0,01 | 0,35 | 0,10 | 0,15 |
| Jawa Timur | 6,74 | 9,36 | 11,87 | 9,32 |
| Banten | 11,15 | 11,06 | 13,00 | 11,74 |
| Bali | 2,48 | 1,96 | 1,37 | 1,93 |
| Nusa Tenggara Barat | 2,39 | 2,59 | 1,71 | 2,23 |
| Nusa Tenggara Timur | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Kalimantan Barat | 2,57 | 1,62 | 2,27 | 2,15 |
| Kalimantan Tengah | 2,79 | 2,14 | 1,68 | 2,20 |
| Kalimantan Selatan | 1,40 | 1,11 | 0,91 | 1,14 |
| Kalimantan Timur | 3,09 | 8,20 | 4,83 | 5,37 |
| Sulawesi Utara | 1,13 | 0,19 | 0,23 | 0,52 |
| Sulawesi Tengah | 1,90 | 3,28 | 2,99 | 2,72 |
| Sulawesi Selatan | 0,46 | 2,37 | 1,62 | 1,48 |
| Sulawesi Tenggara | 0,09 | 0,15 | 0,30 | 0,18 |
| Gorontalo | 0,06 | 0,14 | 0,09 | 0,10 |
| Sulawesi Barat | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Maluku | 0,06 | 0,03 | 0,18 | 0,09 |
| Maluku Utara | 0,67 | 0,37 | 0,94 | 0,66 |
| Papua Barat | 0,17 | 0,13 | 0,19 | 0,16 |
| Papua | 6,74 | 4,89 | 8,25 | 6,63 |

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa persentase Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap GNP (*Gross National Product*) selalu berfluktuasi setiap tahun. Rata-rata persentase investasi terbesar berada pada Jawa Barat dengan nilai sebesar 20,58 persen. Sedangkan yang terendah berada pada provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar 0,02 persen. Tingginya persentase investasi pada provinsi Jawa Barat diakibatkan banyaknya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di daerah tersebut karena banyaknya sektor-sektor yang diminati oleh para investor asing seperti sektor padat karya, perdagangan dan lain sebagainya. Sedangkan rendahnya persentase pada Sulawesi Barat diakibatkan karena kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di provinsi tersebut, apalagi ditambah dengan fakta bahwa provinsi Sulawesi Barat baru saja diresmikan tahun 2005 lalu, sehingga masih banyak kekurangan yang ada pada provinsi tersebut.

Pengeluaran pemerintah juga merupakan salah satu variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Terjadinya prasarana/infrastruktur yang cukup merupakan salah satu faktor penting berjalannya dengan baik proses pembangunan suatu daerah. Gravitasi ekonomi sangat tergantung kepada sarana lalu lintas seperti jalan, jembatan, lalu lintas barang dan jasa-jasa serta mobilitas faktor produksi sangat ditentukan oleh prasarana/infrastruktur yang ada. Pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan pengeluaran pemerintah di provinsi-provinsi Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 :

Tabel 5.
Data Persentase Pengeluaran Pemerintah Infrastruktur terhadap
Pengeluaran Pemerintah di Provinsi-Provinsi Indonesia tahun 2011 hingga
2013 (dalam persentase)

| Provinsi | Tahun | | | Rata-rata |
|---------------------------|-------|------|------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Aceh | 1,33 | 1,19 | 1,70 | 1,41 |
| Sumatera Utara | 0,75 | 0,46 | 0,43 | 0,55 |
| Sumatera Barat | 0,29 | 0,40 | 0,31 | 0,33 |
| Riau | 0,05 | 0,67 | 1,11 | 0,61 |
| Jambi | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,28 |
| Sumatera Selatan | 0,59 | 0,51 | 0,50 | 0,53 |
| Bengkulu | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Lampung | 0,29 | 0,39 | 0,47 | 0,38 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,18 |
| Kepulauan Riau | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| DKI Jakarta | 3,60 | 3,50 | 3,19 | 3,43 |
| Jawa Barat | 0,60 | 0,49 | 0,46 | 0,52 |
| Jawa Tengah | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,43 |
| DI Yogyakarta | 0,16 | 0,12 | 0,34 | 0,21 |
| Jawa Timur | 0,54 | 0,58 | 0,47 | 0,53 |
| Banten | 0,49 | 0,51 | 0,68 | 0,56 |
| Bali | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,10 |
| Nusa Tenggara Barat | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,22 |
| Nusa Tenggara Timur | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| Kalimantan Barat | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,27 |
| Kalimantan Tengah | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,23 |
| Kalimantan Selatan | 0,24 | 0,18 | 0,28 | 0,23 |
| Kalimantan Timur | 1,09 | 1,56 | 1,22 | 1,29 |
| Sulawesi Utara | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,16 |
| Sulawesi Tengah | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,15 |
| Sulawesi Selatan | 0,31 | 0,29 | 0,50 | 0,37 |
| Sulawesi Tenggara | 0,15 | 0,20 | 0,16 | 0,17 |
| Gorontalo | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Sulawesi Barat | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,09 |
| Maluku | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| Maluku Utara | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,13 |
| Papua Barat | 0,20 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| Papua | 0,44 | 0,37 | 0,03 | 0,28 |

Sumber : DJPK.Kemenkeu.2014

Dari Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa persentase pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur dari total pengeluaran pemerintah, menunjukkan bahwa setiap tahun selalu mengalami fluktuasi. Pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur tertinggi berada pada provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia sehingga semua kegiatan berpusat pada provinsi ini baik dari segi pemerintahan, perekonomian, peradilan dan sebagainya. Sedangkan rata-rata pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur terendah berada pada provinsi Gorontalo dengan nilai sebesar 0,07 persen. Hal ini diakibatkan karena provinsi ini merupakan provinsi yang baru diresmikan oleh pemerintah, sehingga pengeluaran pemerintah tidak terlalu menggunakan dana yang banyak untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dalam memperlancar perekonomian di provinsi tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelasnya hubungan antar variabel bebas yang diduga memiliki pengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.
Indeks Gini, Angkatan Kerja, Rata-rata Lama Sekolah, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia tahun 2010-2013

| Tahun | Indeks Gini | Angkatan Kerja Yang Bekerja (jiwa) | Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja Yang Bekerja (%) | Rata-rata Lama Sekolah (%) | Laju Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (%) | Investasi (juta USD) | Laju Pertumbuhan Investasi (%) | Pengeluaran Pemerintah (juta rupiah) | Laju Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah (%) |
|------------------|-------------|------------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2010 | 0,38 | 117579066 | - | 7,9 | - | 16214,8 | - | 1042,1 | - |
| 2011 | 0,41 | 116097701 | -1,28 | 7,9 | 0 | 19474,2 | 16,74 | 1295 | 19,53 |
| 2012 | 0,41 | 119849734 | 3,13 | 8,1 | 2,47 | 24564,7 | 20,72 | 1548,3 | 16,36 |
| 2013 | 0,41 | 12017003 | 0,27 | 8,1 | 0 | 28617,5 | 14,16 | 1683 | 8,00 |
| Rata-rata | 0,40 | 118424626 | 0,71 | 8,0 | 0,82 | 22217,8 | 17,21 | 1392,1 | 14,63 |

Sumber : BPS dan Kemenkeu 2013, data diolah

Tabel 6 diatas, memperlihatkan keadaan indeks gini di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013. Dimana angka indeks gini pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari 0,38 pada tahun 2010 menjadi 0,41 pada tahun 2011. Peningkatan angka indeks gini tersebut, diduga dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas seperti tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi dan pengeluaran pemerintah. Kenaikan angka indeks gini pada tahun 2011, diperkirakan karena masih banyak penduduk yang miskin, serta lapangan pekerjaan yang tersedia juga tidak memadai untuk menampung para tenaga kerja yang semakin bertambah setiap tahun dan rendahnya kesejahteraan masyarakat yang terpusat di daerah Indonesia bagian timur.

Angka indeks gini pada tahun 2012 menunjukkan angka sebesar 0,41 yang berarti distribusi pendapatan berada pada kondisi timpang atau tidak merata. Laju pertumbuhan tenaga kerja pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,13%. Ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa meningkatnya laju pertumbuhan tenaga kerja, mengakibatkan distribusi pendapatan semakin merata. Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata lama sekolah, juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,4%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan, akan mengakibatkan distribusi pendapatan semakin merata. Yang terjadi malah sebaliknya, dengan meningkatnya tingkat pendidikan menyebabkan distribusi pendapatan semakin timpang. Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan investasi pada tahun 2012, menunjukkan angka sebesar 20,72%. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa dengan semakin meningkatnya investasi maka

distribusi pendapatan yang terjadi semakin merata dan bukan semakin timpang. Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada tahun 2012, yang mengalami penurunan menjadi sebesar 16,36%, menunjukkan bahwa hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa dengan semakin rendahnya pengeluaran pemerintah mengakibatkan distribusi pendapatan yang terjadi semakin timpang.

Berdasarkan fenomena pembangunan diatas, penulis tertarik meneliti judul **“Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh tenaga kerja terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?
3. Sejauhmana pengaruh investasi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?
5. Sejauhmana secara bersama-sama pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh tenaga kerja terhadap distribusi pendapatan di Indonesia
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap distribusi pendapatan di Indonesia
3. Pengaruh investasi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia
4. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan di Indonesia
5. Pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan di provinsi-provinsi Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Pengembangan ilmu Ekonomi Pembangunan.
3. Peneliti lebih lanjut dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan distribusi pendapatan di Indonesia.
4. Untuk pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana strategi mengurangi ketimpangan pendapatan agar lebih merata di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Distribusi Pendapatan

Menurut Todaro (2000:89), distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Kesenjangan distribusi pendapatan merupakan suatu masalah pokok dalam pembangunan karena distribusi pendapatan ini mencerminkan merata atau tidaknya hasil pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara.

Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi, menurut Ismoro (1995) *dalam* (Rahayu, 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

Menurut Retnosari dalam Olfie (2015), ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut. Alat yang lazim digunakan adalah Gini Ratio dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia (Hasrimi, 2010).

Jadi distribusi pendapatan merupakan suatu gambaran tentang merata atau timpangnya keadaan pembagian hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Yang dimaksudkan adalah distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Alat ukur yang biasa digunakan adalah indeks gini.

a. Jenis Distribusi Pendapatan

1) Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi pendapatan fungsional adalah distribusi yang menerangkan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Disamping memandang individu sebagai kesatuan yang terpisah. Teori ukuran distribusi pendapatan fungsional juga menyelidiki persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dibanding dengan persentase pendapatan yang terdiri dari sewa, bunga dan laba. Menurut Brener dalam Todaro (2000:143) defenisi dari teori distribusi pendapatan dapat dinyatakan bahwa teori-teori distribusi pendapatan diantara kelompok-kelompok dan individu-individu dalam perekonomian. Umumnya distribusi pendapatan dapat dibedakan atas teori

distribusi pendapatan fungsional dan teori pendapatan personal atau pereorangan. Untuk menghitung jumlah penghasilan masyarakat, maka perlu dilihat distribusi pendapatan. Para ekonom umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi.

Menurut Todaro (2003:222) distribusi pendapatan fungsional merupakan ukuran yang berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi pendapatan merupakan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dalam persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang dan modal fisik).

Berdasarkan defenisi dari teori distribusi pendapatan diatas, dimana distribusi pendapatan fungsional merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang sering disebut sebagai distribusi faktor yang berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

2) Distribusi Pendapatan Perorangan

Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang dimaksud bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran dan yang lebih penting adalah mengetahui besarnya perbandingan penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Todaro (2003:222) distribusi pendapatan perorangan adalah merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipermasalahkan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah dan lain-lain.

Distribusi pendapatan perorangan adalah menunjukkan hubungan antara individu-individu atau rumah tangga dengan total pendapatan yang mereka terima. Dalam konsep ini tidak memperhitungkan dari mana pendapatannya diperoleh dan berapa besarnya masing-masing individu atau rumah tangga yang menerima serta asalnya dari bekerja atau penerimaan lain seperti bunga, hibah, laba, warisan dan lain-lain.

Berdasarkan kepada definisi dari teori distribusi pendapatan diatas, maka secara garis besar distribusi pendapatan masyarakat terdiri dari distribusi pendapatan fungsional dan distribusi pendapatan perorangan.

Menganalisis keadaan distribusi pendapatan di beberapa Negara analisisnya mengenai beberapa gambaran mengenai distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak.

b. Ukuran Ketimpangan Pendapatan

1) Koefisien Gini

Menurut Zitikis (2002) dalam H. Karundeng (2014) menyebutkan teori tentang indeks Gini yang pertama kali diperkenalkan oleh Gini pada tahun 1914. Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio dikemukakan oleh C.GINI yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Koefisien gini adalah analisis yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu daerah atau Negara pada suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Bappenas, koefisien gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik (2002).

Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70 sedangkan untuk

negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Dalam gambar. 2.1, rasio ini adalah rasio daerah A yang diarsir dibagi dengan luas segitiga BCD. (Todaro dan Smith, 2003:226). Rumus untuk menghitung gini ratio menurut BPS (2006:8) adalah sebagai berikut :

$$GR = \sum_{i=1}^k f_i (y_i^* + y_{i-1}^*)$$

Keterangan :

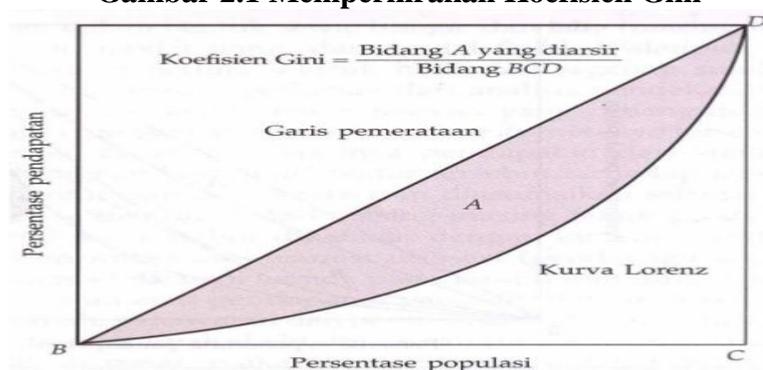
GR = Gini Ratio

y_i = Proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke- i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

k = Jumlah kelas

Gambar 2.1 Memperkirakan Koefisien Gini



Sumber : Todaro dan Smith, 2003

2) Kurva Lorenz

Metode lainnya yang lazim dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz (*Lorenz Curve*). Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selamanya, misalnya satu tahun (Todaro dan Smith, 2006:238). Semakin jauh jarak kurva

Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.

Kasus ekstrem dari ketidakmerataan yang sempurna (yaitu, apabila hanya seorang saja yang menerima seluruh pendapatan nasional, sementara orang-orang lainnya sama sekali tidak menerima pendapatan) akan diperlihatkan oleh kurva Lorenz yang berhimpit dengan sumbu horizontal sebelah bawah dan sumbu vertikal disebelah kanan. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar - benar mereka terima, misalnya dalam satu tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal (garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan disuatu negara maka bentuk kurva lorenznya pun akan semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah.

c. Teori Lewis

Lewis (1954) membahas aspek ketidakmerataan (*inequality*) lebih mendalam. Dengan menggunakan konsep-konsep *mahzab* klasik dan teori Malthus, Lewis mengembangkan model dua sektor dengan mengasumsikan tenaga kerja tersedia dengan jumlah berlebih dan pada tingkat upah subsisten yang tetap. Teori ini menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan akan muncul pada awalnya dan akan menghilang setelah dicapai hasil pembangunan.

Ada dua alasan meningkatnya ketidakmerataan pendapatan pada awal pertumbuhan. Pertama, kontribusi pemilik modal meningkat pada saat sektor modern meningkat sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan antara pemilik modal dan buruh. Kedua, ketimpangan pendapatan distribusi buruh sendiri juga meningkat dengan bertambahnya tenaga kerja (namun masih dalam jumlah yang sedikit namun masih dalam jumlah yang masih sedikit) yang pindah dari tingkat upah sektor subsisten ke tingkat upah sektor modern yang lebih tinggi. Namun, ketidakmerataan tersebut berubah manakala seluruh surplus tenaga kerja diserap oleh sektor modern yang menyebabkan tenaga kerja berubah menjadi faktor produksi yang langka. Tingkat upah kemudian meningkat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat ketidakmerataan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Setiap orang akan memperoleh manfaat apabila mereka menunggu proses pembangunan tersebut berlangsung sampai selesai. Peningkatan sementara dalam ketidakmerataan pendapatan hanya merupakan biaya untuk memperoleh manfaat proses pembangunan tersebut. Tanpa adanya campur tangan pemerintah pemerataan akan terjadi dengan sendirinya pada saat negara telah mencapai tingkat pembangunan dan pendapatan per kapita yang tinggi.

Mahzab strukturalis yang memandang pembangunan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh suatu transformasi yang mengandung perubahan mendasar pada ekonomi yang disebut sebagai perubahan struktural. Perubahan struktural tersebut merupakan masa ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kesenjangan penyesuaian yang panjang (Djojohadikusumo,

1988 dalam Susilowati, 2008). Aliran strukturalis skeptis terhadap efektifitas mekanisme kekuatan harga dan meyakini bahwa perencanaan dan kontrol pemerintah dapat menanggulangi kegagalan pasar. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi negara-negara kurang maju tidak dapat diserahkan kepada mekanisme menjalankan kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan yang melekat pada keadaan ketidakseimbangan tersebut agar sistem pasar dan perkembangan harga dapat berjalan secara memadai.

Berbeda dengan aliran klasik yang percaya bahwa pemerataan pendapatan akan terjadi dengan sendirinya dengan meningkatnya pendapatan per kapita, aliran strukturalis menganggap bahwa masalah distribusi pendapatan dan pemerataan harus dilakukan melalui intervensi pemerintah. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan ekstrim dalam mencapai pertumbuhan dan pemerataan, yaitu aliran ekstrim (radikal) kanan atau aliran yang menganut paham kapitalis yang memfokuskan pada pertumbuhan (*“grow first, then redistribute”*) dan aliran ekstrim kiri atau aliran yang menganut paham sosialis, yang memfokuskan pada masalah pemerataan (*“redistribute first, then grow”*). Sebagai alternatif dari dua aliran ekstrim tersebut, terdapat satu strategi yang beraliran moderat untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan secara bersama, yaitu redistribusi dengan pertumbuhan (*“redistribution with growth/RWG”*) yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

Menurut Kuznets (dalam Sukirno, 2000) bahwa proses pembangunan ekonomi suatu negara pada tahap awal umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, dan baru berbalik menuju suatu

pemerataan yang lebih baik pada tahap pembangunan lebih lanjut. Setiap pembangunan ekonomi menimbulkan perubahan distribusi pendapatan masyarakat. Beberapa ekonom berpendapat bahwa perubahan tersebut kemungkinan timbul sebagai akibat dari adanya perubahan kepemilikan dari sumberdaya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki barang modal lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak yang memiliki modal sedikit.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan

a. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Distribusi Pendapatan

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi 2003:59). Sedangkan menurut UU No.13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Penduduk yang dikatakan sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak melakukan atau tidak mempunyai aktivitas ekonomi. Menurut pengertian BPS yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama

satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

Jadi tenaga kerja adalah penduduk berusia produktif antara 15 hingga 64 tahun yang mampu dan bersedia untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk memperoleh hasil produksi yang digunakan oleh suatu daerah.

Tenaga kerja yang merupakan salah satu dari faktor produksi memiliki pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Karena dengan semakin tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja, akan mengakibatkan pendapatan yang diterima akan semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan distribusi pendapatan semakin mengalami pemerataan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja memiliki dampak negatif terhadap distribusi pendapatan. Dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja akan meningkatkan jumlah pendapatan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mampu mengurangi pengangguran serta kemiskinan dan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan pada suatu daerah ataupun negara.

b. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan

Modal Manusia adalah kumpulan investasi yang dilakukan di masyarakat. Jenis modal manusia yang terpenting adalah pendidikan. Seperti semua jenis modal lainnya, pendidikan mencerminkan suatu pengeluaran sumber-sumber daya pada satu titik dalam waktu yang tujuannya meningkatkan produktivitas masa depan. Namun, tidak seperti investasi dalam

bentuk modal yang lain, investasi di bidang pendidikan terikat pada seseorang, dan keterkaitan semacam inilah yang menjadikannya modal manusia (Mankiw, 2006:513).

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan ekonomi yang mendasar karena pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga karena pendidikan merupakan hal fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan ekonomi hal ini dinyatakan pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan suatu Negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro, 2003:404).

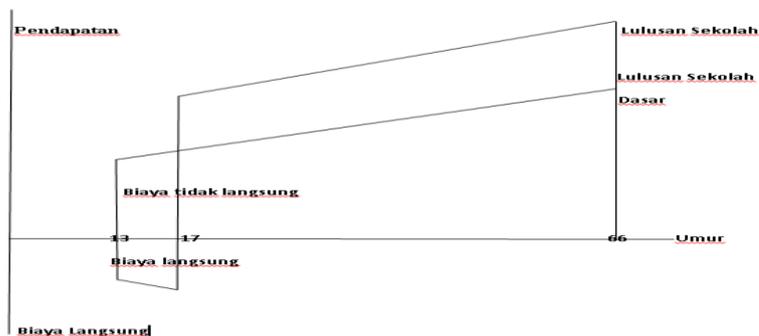
Harbison dalam (Jhingan, 2003:419) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menentukan variasi pendapatan adalah tingkat pendidikan yang pada umumnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan suatu wilayah. Makin tinggi pendidikan dalam suatu wilayah, maka makin tinggi pula pendapatannya. Dan sebaliknya jika tingkat pendidikannya rendah, maka pendapatan yang didapat pun akan rendah.

Salah satu indikator yang digunakan dari pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Menurut defenisi BPS, rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara.

Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum yaitu 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat gambar di bawah ini yang menunjukkan suatu representasi dari *tradeoff* yang terkandung dalam keputusan untuk melanjutkan sekolah. Skema ini mengasumsikan bahwa seseorang bekerja dari saat ia lulus sekolah hingga ia tidak mampu bekerja lagi atau meninggal. Perkiraan ini diambil dari tingkat harapan hidup dunia saat ini yaitu 66 tahun. Dua profil pencari pendapatan disajikan disini – yaitu orang-orang yang lulus pendidikan dasar namun tidak melanjutkan ke pendidikan tingkat atas, dan orang-orang yang lulus pendidikan tingkat atas (atau pendidikan sekunder) namun namun tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Lulusan sekolah dasar mulai bekerja pada usia 13 dan lulusan tingkat atas diasumsikan mulai bekerja pada umur 17. Bagi seseorang di negara berkembang yang memutuskan untuk melanjutkan tingkat pendidikan ke tingkat atas akan mengorbankan 4 tahun pendapatan yang tidak akan diperolehnya karena bersekolah. Hal ini disebut biaya tidak langsung. Disamping itu juga terdapat biaya langsung. Selama sisa hidupnya dia akan memperoleh penghasilan yang lebih besar setiap tahunnya daripada jika ia bekerja dengan berbekal ijazah SD saja. Perbedaan ini disebut “manfaat” dalam gambar dibawah. Sebelum membandingkan biaya dengan manfaatnya, perhatikan bahwa satu dolar yang didapatkan oleh seseorang pada saat ini lebih berharga daripada satu dolar yang diperolehnya dimasa depan, sehingga keuntungan pendapatan dimasa depan tersebut harus didiskontokan sesuai waktunya. (Todaro:2003.415)

Gambar 2.2 Tradeoff Finansial dalam Pengembalian Keputusan untuk Melanjutkan Sekolah



Sumber : Todaro, 2003

Jadi pendidikan adalah salah satu sarana dalam mengembangkan kecerdasan yang mampu untuk memajukan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara, memperoleh kesehatan yang lebih baik serta pendapatan yang diterima pun akan menjadi lebih baik, karena dengan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan mengakibatkan peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan semakin besar. Karena itu, dengan semakin lama rata-rata lama sekolah individu, akan mengakibatkan ilmu yang diperoleh akan semakin tinggi, begitu pula dengan gelar dan tingkatan dalam pendidikan yang diterima, sehingga semakin terbuka peluang untuk mencari pekerjaan dalam rangka memperoleh pendapatan sehingga kesenjangan pendapatan menjadi berkurang.

c. Pengaruh Investasi Terhadap Distribusi Pendapatan

Investasi dapat dikatakan sebagai pengeluaran atau penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Penambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang (Sukirno,2006:121). Sedangkan menurut Mulyadi (2001:284), investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.

Dalam teori pertumbuhan Harrod dan Domar (Todaro, 2004) investasi didefinisikan sebagai perubahan tingkat modal (*stock*) yang terjadi dalam suatu perekonomian dimana sebagian dari pendapatan digunakan untuk tabungan. Pergerakan arus tabungan tersebut kemudian diarahkan untuk menciptakan dana investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tinggi rendahnya tingkat investasi ditentukan berdasarkan pendapatan perkapita masyarakat.

Menurut Kuncoro (2004:203), pendapatan perkapita merupakan indikator untuk melihat daya beli suatu daerah. Pendapatan perkapita yang tinggi pada suatu daerah artinya daya beli masyarakat daerah tersebut juga tinggi. Hal ini menunjukkan potensi investasi yang efektif untuk pasar domestik. Oleh karena itu pendapatan perkapita suatu daerah juga merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan para investor untuk berinvestasi.

Investasi merupakan akumulasi modal sebagai salah satu faktor dalam teori pertumbuhan ekonomi. Gabungan investasi dan teknologi akan meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu produk serta memberikan lebih banyak inovasi. Investasi dalam suatu wilayah akan mendorong investor lainnya untuk melakukan investasi, baik sebagai investor di bidang yang

mendukung investasinya maupun sebagai investor di bidang yang sama (Case & Fair,2009).

Mankiw (2003:25), investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional, yaitu *Gross Domestic Product* (GDP) yang dihitung berdasarkan pengeluaran dan terdiri dari empat komponen utama yaitu konsumsi, investasi, pembelian pemerintah dan ekspor neto.

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

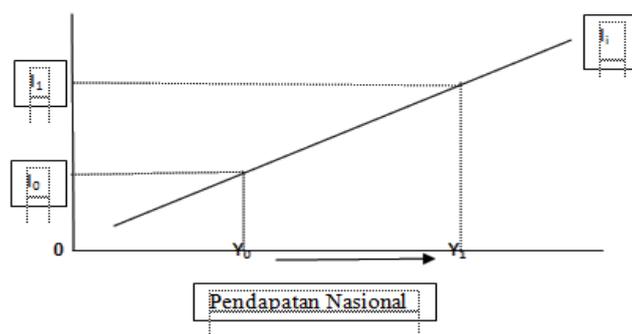
Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa investasi berkorelasi positif dengan GDP. Secara umum dapat dikatakan, jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung turun. Dalam jangka panjang, apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula. Apabila dimisalkan ciri-ciri perkaitan di antara investasi dengan pendapatan nasional adalah seperti yang dinyatakan oleh gambar 2.3 dibawah ini yang menyatakan bahwa fungsi investasi adalah seperti yang ditunjukkan oleh fungsi I_i . Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, maka akan semakin tinggi pula tingkat investasinya. Sebagai contoh, kenaikan pendapatan nasional dari Y_0 menjadi Y_1 menyebabkan investasi meningkat dari I_0 menjadi I_1 (Sukirno, 2006:130).

Menurut Gusti (2013) investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta kesuatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transport baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus

dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Termasuk kedalam keuntungan lokasi ini adalah keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dari daerah pedesaan.

Namun, semakin tinggi investasi maka kesenjangan pendapatan juga akan semakin meningkat. Karena investasi hanya dinikmati oleh para penanam modal dan bagi orang kaya yang memiliki pendapatan tinggi dan menanamkan modal investasi pada perusahaan tertentu di suatu daerah. Investasi juga ditanamkan hanya terpusat pada suatu daerah yang memiliki potensi yang tinggi. Karena hal itu lah semakin tinggi investasi hanya mengakibatkan kesenjangan pendapatan semakin meningkat.

Gambar 2.3 Hubungan Investasi dengan Pendapatan Nasional



Sumber : Sukirno, 2006

d. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini

akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Wagner dalam Wildan). Sedangkan menurut Sukirno (2006:38), pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pembayaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk mengembangkan infrastruktur yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari.

Menurut Guritno (2002:2), kebijakan anggaran (*budget policy*) dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu:

- a. *Resources Transfer* (Perpindahan sumber daya)
Kebijakan anggaran pemerintah berupa perubahan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan terjadi pengalihan/transfer input dari perseorangan (individu/swasta) kepada masyarakat (publik). Kenaikan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang/jasa publik akan meningkatkan penyerapan input yang ada dalam perekonomian sehingga input yang dapat digunakan pihak swasta akan menurun dan sebaliknya. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu perekonomian.
- b. *Incident* (Distribusi pendapatan)
Perubahan alokasi input akibat perubahan kebijakan pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Pada perekonomian yang sudah mencapai *full employment* jika pengeluaran pemerintah meningkat berarti transfer input dari swasta kepada penggunaan untuk publik sehingga pendapatan riil swasta akan menurun. Disisi lain peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat (publik) sebagai balas jasa dari peningkatan penggunaan input untuk publik,
- c. *Output Effect* (Perubahan Terhadap Output)
Menganalisis bagaimana fungsi pajak untuk mengatur pendapatan keuangan sebagai dasar perubahan pajak. Transfer sumber daya untuk digunakan masyarakat juga meningkat.

Menurut teori Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sedangkan menurut Wagner, bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan ikut meningkat. (Guritno.2002).

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan menurut Todaro (2000) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan

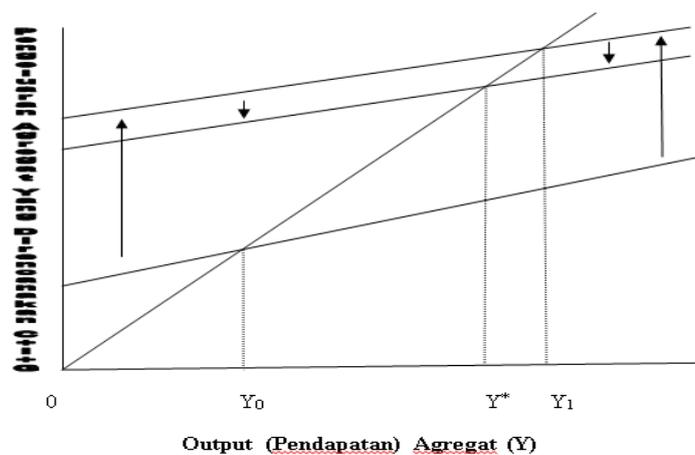
pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer”, dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang berbeda pada setiap daerah akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat daerah bersangkutan yang tercermin dalam PDRB daerah tersebut.

Berbeda dengan aliran klasik yang percaya bahwa pemerataan pendapatan akan terjadi dengan sendirinya dengan meningkatnya pendapatan per kapita, aliran strukturalis menganggap bahwa masalah distribusi pendapatan dan pemerataan harus dilakukan melalui intervensi pemerintah. Salah satu bentuk dari intervensi pemerintah itu adalah melalui pengeluaran pemerintah.

Selain itu, kecenderungan peningkatan belanja pemerintah yang menyebabkan pengurangan belanja investasi swasta yang disebut dengan efek penurunan investasi swasta (*crowding-out effect*). Tanpa ekspansi apa pun dalam penawaran uang untuk mengakomodasi peningkatan pendapatan dan peningkatan permintaan uang, belanja investasi yang direncanakan sebagian didesak keluar oleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Belanja ekstra yang diciptakan oleh naiknya pembelian pemerintah kadang dikompensasi oleh

turunnya belanja investasi yang direncanakan. Pendapatan masih naik, tapi angka efek pengganda kenaikan G dikurangi karena efek negative tingkat bunga yang lebih tinggi atas investasi yang direncanakan (Case and Fair : 2007:177). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat melalui kurva efek *crowding-out* seperti dibawah ini :

Gambar 2.4 Efek Crowding-Out



Sumber : Case and Fair, 2007

Dari kurva diatas, menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dari G_0 ke G_1 menggeser kurva pengeluaran agregat yang direncanakan ($C+I+G$) naik keatas. Peningkatan (Y) dari Y_0 ke Y_1 menyebabkan permintaan uang naik, yang menghasilkan disequilibrium dalam pasar uang. Permintaan yang berlebih meningkatkan tingkat bunga, yang meningkatkan tingkat bunga, yang menyebabkan I turun dari I_0 ke I_1 . Turunnya I menarik kurva pengeluaran agregat yang direncanakan kemabali turun, yang menurunkan tingkat ekuilibrium pendapatan dari Y^* (Ingat bahwa ekuilibrium dicapai ketika $Y=AE$) (Case and Fair:2007.178).

Pada penelitian ini pengeluaran pemerintah yang diteliti adalah pada sektor infrastruktur. Dimana infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Perannya sangat baik bagi dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Infrastruktur yang baik nantinya juga akan merangsang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

1. Asri (2005) dalam penelitiannya tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (kajian antar propinsi di Indonesia periode 1994-2003) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah kelompok sektor primer, perdagangan dan transportasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan sosial berpengaruh dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk.
2. Rahayu (2009) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh modal, tenaga kerja dan sda (energi) pada industri besar dan sedang terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pemerataan distribusi di Indonesia.
3. Gagana (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan (Studi empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2011-2013), yang mengungkapkan

bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.

4. Ratriadi (2009) dalam penelitiannya tentang analisis disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.
5. Cecchi (2001) dalam penelitiannya tentang *education, inequality and income inequality*, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dengan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.
6. Gusti (2013) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
7. Dulani dan Yan Sun (2013) dalam penelitiannya tentang infrastruktur dan distribusi pendapatan di ASEAN-5 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan.

C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

1. Kerangka konseptual

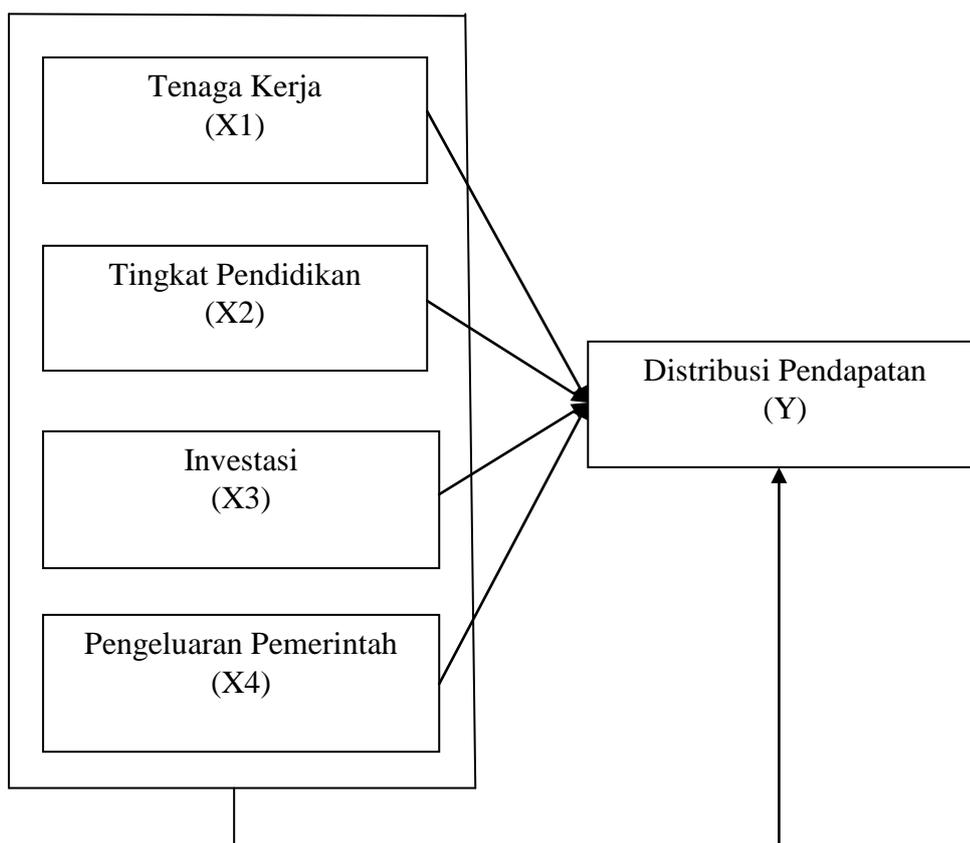
Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara

variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah.

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi dan pengeluaran pemerintah merupakan variabel-variabel bebas yang akan digunakan dalam penelitian ini dalam memperlihatkan hubungannya dengan distribusi pendapatan.

Variabel tenaga kerja (X_1) dengan indikator tenaga kerja yang bekerja mempunyai pengaruh yang negatif terhadap distribusi pendapatan. Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, maka pendapatan yang diterima juga akan semakin meningkat, sehingga indeks gini akan menurun yang nantinya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Variabel pendidikan (X_2) dengan indikator rata-rata lama sekolah mempunyai pengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka pendapatan yang akan diterima juga semakin tinggi yang nantinya akan menimbulkan pemerataan pada distribusi pendapatan yang dapat dilihat dari menurunnya angka indeks gini. Untuk variabel investasi (X_3) dengan indikator PMA (Penanaman Modal Asing) mempunyai pengaruh positif terhadap terhadap distribusi pendapatan. Semakin tinggi investasi, maka semakin meningkatkan angka indeks gini sehingga distribusi pendapatan semakin timpang. Sedangkan, variabel pengeluaran pemerintah (X_4) dengan indikator infrastruktur mempunyai pengaruh negatif. Semakin banyak pembangunan terhadap infrastruktur maka pendapatan yang diterima juga akan semakin meningkat, yang nantinya juga akan menimbulkan pemerataan

distribusi pendapatan yang dapat dilihat dari menurunnya angka indeks gini. Untuk lebih jelasnya keterkaitan variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema/bagan konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.5. Kerangka Konseptual Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia

2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Distribusi Pendapatan.

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

b. Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Distribusi Pendapatan.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$H_a: \beta_2 \neq 0$$

c. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Distribusi Pendapatan.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 \neq 0$$

d. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Distribusi Pendapatan.

$$H_0: \beta_4 = 0$$

$$H_a: \beta_4 \neq 0$$

e. Bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan.

$$H_0: \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_a = \text{salah satu koefisien } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel, pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas: tenaga kerja (X_1), tingkat pendidikan (X_2), investasi (X_3) dan pengeluaran pemerintah (X_4) terhadap variabel terikat distribusi pendapatan (Y) di Indonesia secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks gini. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada tenaga kerja, akan mengakibatkan perubahan pada distribusi pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi tenaga kerja akan menurunkan indeks gini yang menggambarkan keadaan distribusi pendapatan yang semakin merata.
2. Tingkat pendidikan dengan ukuran rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks gini. Artinya, apabila terjadi perubahan pada tingkat pendidikan, tidak akan mempengaruhi distribusi pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tingkat pendidikan pendapatan yang diterima juga akan semakin meningkat, sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan berkurang.
3. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks gini. Artinya, setiap perubahan yang terjadi

pada investasi asing, akan memberikan pengaruh pada distribusi pendapatan. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa investasi yang semakin meningkat akan mengakibatkan kesenjangan pendapatan, karena investasi hanya terpusat pada satu daerah dan tidak semua kalangan yang mampu untuk menikmati investasi tersebut.

4. Pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan. Artinya, apabila terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah, tidak akan mengakibatkan perubahan pada distribusi pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi akan mengakibatkan pemerataan pada distribusi pendapatan.
5. Secara bersama-sama tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pendapatan. Artinya setiap terjadi perubahan pada tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi dan pengeluaran pemerintah bersama-sama akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada distribusi pendapatan.

B. Saran

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan yang berujung pada meratanya distribusi pendapatan.

2. Bagi masyarakat agar semakin menyadari bahwa pendidikan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas serta kesejahteraan hidup. Diharapkan pemerintah dapat terus menerus membangun dan meningkatkan sarana-prasana (fasilitas) sekolah merata disemua daerah, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu agar dapat terus bersekolah sehingga kualitas modal manusia juga dapat meningkat, lebih gencar lagi melaksanakan program Wajib Belajar 9 Tahun, serta penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien.
3. Diharapkan bagi pemerintah agar alokasi investasi hendaknya diarahkan pada kabupaten/kota yang memiliki investasi fisik yang rendah, sehingga alokasi investasi tidak terpusat pada daerah tertentu dan alokasi investasi juga diharapkan merata di semua sektor. Alokasi investasi juga harus dilihat berdasarkan potensi daerah yang belum diupayakan, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang baru terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya.
4. Diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperbaiki kualitas dan kuantitas pada infrastruktur di seluruh provinsi Indonesia agar mampu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerahnya dan mampu untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya.
5. Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya peneliti berikutnya menambah jumlah variabel independen yang mempengaruhi variabel distribusi pendapatan sehingga model yang dihasilkan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, Wildan. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia*. Surabaya. UNESA.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2012*. BPS Sumatera Barat: Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2013*. BPS Sumatera Barat: Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2014*. BPS Sumatera Barat: Sumatera Barat.
- Bastias. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 1969-2009*. Skripsi. Semarang: UNDIP.
- Case, Karl E and Ray C. Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro Edisi Lima*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Dulani dan Yan Sun. 2013. *Infrastruktur dan Distribusi Pendapatan di ASEAN-5*. Jurnal.
- Gagina, Putri Ado. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2011-2013)*, Skripsi. Surakarta : UMS.
- Gujarati, Damador. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Gusti, I Ayu Putri Wahyuni. 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan*. Skripsi. Bali : Universitas Udayana.
- H. Karundeng, Philips d.kk. 2014. *Distribusi Pendapatan Petani Di desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur*. Jurnal .
- Hasrimi, Moettaqien. 2010. *Analisis Pendapatan Petani Miskin dan Implikasi Kebijakan Pengentasannya di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal.
- Ikhsan, Muhammad. 2008. *Mengoptimalkan Pnegluaran Pemerintah untuk Memperbaiki Distribusi Pendapatan di Indonesia*. Paper